

June 2023

Arsip sebagai “Mata Ketiga:” Hikayat Rezim Pangan di Kalimantan

Rio Heykhal Belvage
Universitas Gadjah Mada

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jai>



Part of the [Anthropology Commons](#)

Recommended Citation

Belvage, Rio Heykhal (2023) "Arsip sebagai “Mata Ketiga:” Hikayat Rezim Pangan di Kalimantan," *Antropologi Indonesia*: Vol. 43: Iss. 1, Article 2.

DOI: 10.7454/jai.v43i1.1014

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jai/vol43/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Antropologi Indonesia* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Arsip sebagai “Mata Ketiga:” Hikayat Rezim Pangan di Kalimantan

Cover Page Footnote

Tulisan ini adalah bagian dari penelitian doktoral saya dalam studi antropologi, yang terwujud berkat beasiswa kerja sama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Helsinki dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dalam riset “Water and Vulnerability in Fragile Societies.” Saya berterima kasih kepada Prof. Pujo Semedi, Dr. Anu Lounela, dan Dr. Pande Made Kutanegara selaku guru, promotor dan kopromotor yang menuntun saya sedari awal proses studi, juga Amanatia Junda yang telah membaca naskah awal serta memberi masukan, Azzam Anwar, Nindyo Budi Kumoro, dan Agus Riyadi yang menjadi kawan diskusi selama proses penulisan, serta para mitra bestari dan editor jurnal yang telah memberikan saran dan masukan berharga untuk memperbaiki tulisan ini.

Arsip sebagai “Mata Ketiga:” Hikayat Rezim Pangan di Kalimantan

Rio Heykhal Belvage
Universitas Gadjah Mada

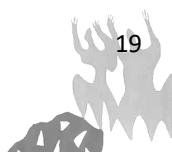
Abstract

This paper is based on an archival study in the context of river agroecosystem change in Central Kalimantan. Based on several sources of archives, there's a thing which significantly affected the changes in the water system in Kalimantan, namely a food regime which started in early 20th century. The discovery leads to three things. First, there is an intense relationship between food regime and knowledge regime that contributes to environmental damage. Second, there is a sustained bias behind the government's food policy since colonial to current post-colonial period. Lastly, there is perpetual failure of the food regime. Under the food regime, agriculture is seen as a technical matter by ignoring cultural element of local community. It is this element that this article tries to present through the community's food mythology in the history of the food regime. This article argues that food regime is also bound by myth. However, unlike the local myths that were born from historical process of adapting environment, myths the policymakers believe in are ahistorical, because theirs are not rooted in the culture of the people in Kalimantan. This article highlights how archival research can be used in the context of doing ethnography on food regime in Indonesia.

Keywords: archive, food regime, knowledge regime, myth, Kalimantan.

Pengantar

Tulisan ini berangkat dari dilema yang saya alami dalam menerapkan metode riset di tengah pandemi Covid-19 sebagai mahasiswa doktoral antropologi yang belajar tentang kehidupan orang Dayak di tengah perubahan agroekosistem sungai di Kalimantan Tengah. Sebelum pandemi, saya telah dua kali melakukan studi awal ke lapangan. Rencana pun sudah tersusun untuk melanjutkan riset lapangan dan mengolah data. Tetapi di luar perkiraan, rencana ini ambyar. Sama dengan di Jawa saat berlangsung karantina wilayah, di Kalimantan pandemi juga membuat warga waswas dengan kehadiran orang luar. Informasi ini saya dapat saat memastikan kondisi di sana melalui telepon. Kenalan saya di lapangan tidak enak hati menolak terang-terangan rencana saya ke sana ketika awal pandemi. Ia hanya menceritakan kondisi di desa bahwa beberapa tetangganya sudah ada yang terpapar virus, bahkan meninggal dunia. Ayahnya yang sehari-hari bekerja di kantor desa, saat itu sering membantu membuat peti mati untuk warga yang meninggal. Saya menjadi ragu. Dalam dilema seperti ini, akhirnya saya memilih menunda jadwal ke lapangan, sehingga saya mesti menyiasati keadaan agar masa studi tidak terbuang sia-sia. Beruntung saat itu promotor saya memahami situasi ini. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk ke lapangan, ia menyarankan saya mengumpulkan data arsip terlebih dahulu. Ia membagikan tautan pencarian arsip di www.delpher.nl. Sejak itu, dari



bulan November 2020 hingga Maret 2021, siang–malam saya bekerja mengumpulkan data arsip dibantu penerjemahan dari mesin pencari *Google*. Setelah mulai terbiasa, sumber yang saya akses mulai bervariasi, tidak lagi dari masa kolonial saja, tapi juga sumber-sumber lain dari masa sesudahnya, seperti dokumen, literatur, majalah dan surat kabar *Tempo* dan *Kompas* sejak tahun 1960-an hingga 2020-an. Dalam tulisan ini, saya memanfaatkan data arsip dari tahun 1910-an sampai 2000-an.

Saat mengumpulkan data arsip, saya menemukan apa yang sebelumnya tidak saya bayangkan, tapi berpengaruh signifikan pada perubahan tata air di Kalimantan. Temuan ini terkait kebijakan pangan yang telah dimulai pada permulaan abad ke-20. Perhatian saya pada pengaturan pangan sendiri mulanya berawal dari reaksi spontan atas santerinya berita tentang rencana *Food Estate*¹ di Kalimantan Tengah pada awal pandemi 2020, sebagai respons pemerintah atas peringatan bahaya krisis pangan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO).² Ketika sedang mengumpulkan data arsip, saya pun menjadi penasaran, sejak kapan kebijakan pengaturan pangan di Kalimantan bermula? Kondisi-kondisi seperti apa yang melatarbelakangi kebijakan ini?

Arsip adalah museum memori. Keberadaannya mencerminkan ruang tempat logika kekuasaan dipraktikkan (Stoler, 2021). Dalam konteks pengaturan, arsip dokumen menjadi instrumen yang menghubungkan antara wacana dan individu, tindakan, objek, dan lingkungan, dalam membangun hubungan antara kata-kata dengan hal-hal yang diperlukan untuk menerapkan pengaturan (Hull, 2012). Keberadaan arsip mencirikan suatu pemikiran, bentuk kolonisasi dan pengaturan (Stoler, 2010; Zeitlyn, 2012). Tulisan ini tidak menerapkan studi seketat sejarawan yang telah terbiasa berinteraksi dengan arsip, di mana studi arsip dalam pengertian konservatifnya dipahami sebagai studi terhadap dokumen otentik dari tangan pertama. Stoler (2010) dalam *Along the Archival Grain* telah menyumbangkan gagasan berharga bagi studi arsip dalam antropologi, di mana arsip bukan hanya dilihat dari sisi informasinya, tapi juga diposisikan sebagai bentuk pengetahuan politis yang mencerminkan beroperasinya logika kekuasaan dalam mendasari suatu pengaturan. Di sini metode pengkajian arsip saya gunakan lebih sebagai metode pengumpulan data ketika situasi belum memungkinkan untuk melakukan penelitian lapangan.

Dari arsip, saya mendapatkan pemahaman bahwa praktik pengaturan pangan di Kalimantan bukan hal baru. Studi yang dikerjakan oleh Lindblad (2012) tentang sejarah ekonomi Kalimantan memperlihatkan praktik pengaturan pangan hanyalah bagian dari pengaturan pemerintah di negara koloni, di samping pertambangan dan perkebunan yang telah lebih dulu dijalankan. Pada saat yang sama, saya juga menjumpai wacana kritis terkait kebijakan pangan (*Food Estate*) di Kalimantan paling jauh hanya bertolak dari tahun 1990-an,

¹ *Food estate* adalah proyek pengembangan budidaya pertanian pangan skala besar berbasis modernisasi pertanian yang didukung oleh ilmu pengetahuan, modal dan teknologi modern. Proyek ini berbeda dengan sistem produksi pangan lokal yang menekankan pada ikatan kekerabatan, bersifat komunal, skala produksi kecil, dengan teknologi pengaturan tradisional sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan (Lihat, misalnya, Savitri, 2013).

² Untuk lebih jelasnya, lihat berita terkait di mesin *google* dengan mengetik kata kunci: *food estate*, FAO dan Kalimantan Tengah, juga laporan dari FAO tahun 2020 berjudul *Addressing the impact of Covid-19 in food crisis. FAO's component of the global Covid-19 Humanitarian Response Plan*.

saat berlangsung Pembukaan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar.³ Seolah ada kepingan sejarah yang (di)hilang(kan). Oleh karena itu, saya tertarik untuk melengkapi narasi yang belum banyak diungkap dalam wacana pengaturan pangan (lihat, misalnya, McCarthy, 2013; Savitri dan Prawirosusanto, 2015; Goldstein, 2016). Meski pilihan melakukan pengumpulan data arsip mulanya bersifat spontan alih-alih terencana, namun penelusuran tersebut membawa saya pada tiga hal. Pertama, ada relasi intens antara praktik pengaturan pangan dan rezim pengetahuan yang berkontribusi merusak lingkungan. Kedua, ketika pengaturan pangan diterapkan, ada kegagalan berkelanjutan dalam praktik pengaturan tersebut di Kalimantan. Ketiga, ada belenggu pemikiran kolonial di masa pemerintahan Indonesia.

Terkait dengan metode, saya mengikuti pandangan Evans-Pritchard (1950, 1961), bahwa antropologi adalah juga sejenis sejarah. Bagi Evans-Pritchard, antropolog bekerja layaknya sejarawan saat mencari pola melalui pendekatan diakronis untuk memahami sifat historis subjek yang dipelajari. Studi antropologi, dalam pandangannya, melihat masyarakat sebagai sistem moral bukan untuk mereduksi kehidupan ke dalam hukum ilmiah, tapi untuk mencari pola dan menafsirkannya.⁴ Ungkapan Evans-Pritchard tersebut adalah kritik atas dominasi pendekatan sinkronis kala itu yang menolak bukti-bukti tidak langsung seperti dokumen masa lalu dari subjek tinjeli dengan meminjam model ilmu alam (*organisme*) untuk menjelaskan gejala sosial. Dalam melakukan pekerjaannya, antropolog tidak hanya bertumpu pada data terkini (*sinkronis*) melalui penelitian lapangan. Sebab untuk dapat memahami subjek yang dikaji, dibutuhkan pengetahuan mengenai masa lalu yang membentuk dan memengaruhi kondisi masa kini. Di sinilah pentingnya keberadaan sumber historis seperti dokumen, koran, majalah dan memoar dalam melengkapi kerja etnografi. Hal ini meyakinkan saya dalam mengatasi dilema metode dengan menempatkan arsip sebagai pengganti data lapangan saat situasi belum memungkinkan untuk mendapatkannya. Saya menjadikan arsip sebagai “mata ketiga” untuk memahami pengaturan pangan di Kalimantan. Persoalannya, bagaimana praktik pengaturan tersebut selanjutnya ditafsirkan? Atas dasar inilah saya menarasikan hikayat rezim pangan di Kalimantan.

Artikulasi Pangan sebagai Relasi, Rezim, dan Mitos

Persoalan pangan selalu melibatkan hubungan sosial sejak dari mulai produksi, distribusi, hingga konsumsi. Oleh karena itu, pangan selalu membawa serta pengaturan, mulai dari unit sosial terkecil keluarga, sampai pengaturan negara hingga tatanan global. Tanpa adanya aturan yang disepakati bersama, mustahil produksi pangan dapat berlanjut. Konsensus tentang aturan ini menjadi ruang hegemonik yang beroperasi dalam multi-skala: lokal,

³ Misalnya, tulisan Simanjuntak dan Erwinsyah (2020) berjudul “Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan pada masa Pandemi Covid-19” yang merespon kebijakan *Food Estate* di awal pandemi, tanggapan netizen di media sosial atau lembaga lingkungan yang menyuarakan kritik atas *Food Estate* seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Tengah melalui film dokumenter berjudul “Fool Estate, Dilema Cita-cita Ketahanan Pangan Indonesia (2021).”

⁴ Evans-Pritchard menyatakan; “..Social anthropology is a kind of historiography, and therefore..., implies that it studies societies as moral systems and not as natural systems, that it is interested in design rather than in process, and that it therefore seeks patterns and not scientific laws, and interprets rather than explains (Evans-Pritchard, 1950: 198).”



nasional, regional, hingga global. Secara historis pengaturan ini bisa ditelusuri melalui arsip, di mana dalam soal pangan praktik pengaturan pada gilirannya memungkinkan hadirnya suatu rezim, yaitu rezim pangan. Rezim pangan dipahami sebagai sistem relasi, aturan, dan praktik yang membentuk struktur pembagian kerja internasional dan perdagangan hasil pertanian di bawah kapitalisme global yang beroperasi sejak tahun 1870-an, saat pertama kali dalam sejarah, produksi pangan dilakukan secara masif dan ditransportasikan dalam jarak jauh (Savitri, 2020). Menurut McMichael (2009), konsep rezim pangan pertama kali dirumuskan oleh Harriet Friedmann untuk menjelaskan tatanan pangan global pasca-Perang Dunia Kedua. Friedmann menelusuri bagaimana program bantuan pangan AS menjadi senjata geopolitik Perang Dingin, dengan fokus pada struktur pangan dalam pengaturan produksi dan konsumsi skala global. Rumusan ini kemudian dikembangkan Friedmann dan McMichael dengan menitikberatkan pada modernisasi pertanian. Keduanya menetapkan fakta-fakta historis untuk menguraikan sejarah pembentukan sektor pangan nasional. Rezim pangan menekankan aspek historis terkait hubungan antara ekonomi, politik, dan lingkungan. Persoalan muncul ketika pengaturan pangan diintervensi oleh agen eksternal yang berakibat pada hilangnya otonomi petani dalam melangsungkan produksi dengan caranya sendiri (van der Ploeg, 2020). Dilihat dari gejala yang umum ditemukan, intervensi ini menandai adanya relasi kuasa antara otoritas negara dengan otonomi petani.

Dalam konteks inilah, data arsip tentang Kalimantan memperlihatkan gejala di mana persoalan pangan oleh negara dipandang sebagai soal teknis dengan mengabaikan elemen-elemen lain dari budaya masyarakat setempat. Apa yang mendasari negara memiliki rasionalitas demikian, telah diuraikan secara provokatif oleh Scott (1998) dalam *Seeing Like a State*, di mana ideologi modernis menuntun negara dalam menjalankan berbagai program atas nama kesejahteraan yang justru menimbulkan masalah, tak terkecuali di sektor pangan. Tulisan ini mencoba mengungkap elemen yang diabaikan tersebut. Pemahaman tentang pangan sebagai relasi dan rezim mengarahkan fokus studi ini dari komoditas pangan sebagai objek ke komoditas sebagai relasi yang terhubung dengan situasi sosial, budaya, politik, dan lingkungan dalam momen historis yang signifikan (McMichael, 2009).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2016) disebutkan, mitos ialah cerita suatu bangsa tentang dewa-dewi, asal-usul penciptaan alam semesta dan manusia. Ini adalah pengertian paling umum dari versi resmi negara tentang mitos. Pemahaman lebih luas dan mendalam tentang mitos dapat dijumpai dalam banyak studi yang telah dikerjakan antropolog sebelumnya. Dalam uraian van Baal (1987), misalnya, mitos dipahami sebagai bagian tradisi dari zaman prasejarah, yang biasanya berhubungan dengan dewa-dewa atau kekuatan alam yang dipersonifikasi; juga cerita yang tidak mengandung kebenaran tapi diperlakukan sebagai kebenaran. Selain van Baal, ahli lain yang juga mengeksplorasi mitos di antaranya Ernst Cassirer yang mempelajarinya dari aspek simbol, James Frazer dan E. B. Tylor dari sisi religi, atau Claude Lévi-Strauss dan van Wouden dengan penjelajahan strukturalis mereka. Masing-masing ahli tersebut mempelajari mitos dengan cara berbeda, namun semuanya sepakat dalam satu hal, bahwa mitos adalah unsur penting untuk memahami dunia sosial.

Penjelasan paling sederhana mengenai mitos saya baca dari uraian Barthes (2004) dalam *Mitologi*. Ia mendefinisikan mitos sebagai tipe wicara. Segala sesuatu bisa menjadi mitos asal



disajikan oleh wacana. Mitos pangan yang saya sebut di sini bukan aspek pangannya, melainkan anggapan yang melandasi pengorganisasian tenaga kerja sehingga makanan menjadi mungkin untuk diproduksi dan didistribusikan. Anggapan ini mendapati bentuknya dari keberadaan cerita, slogan, atau jargon yang diyakini dan berfungsi mengikat solidaritas melalui keyakinan bersama. Dalam hal ini, keyakinan pada mitos bukanlah sabda yang jatuh dari langit, tetapi hasil dari proses sosial yang melibatkan hubungan timbal-balik antara manusia, lingkungan, situasi sosial, budaya, dan politik dalam ruang yang menyejarah. Keyakinan ini menjadi referensi nilai tentang sesuatu yang dianggap benar, yang menjadi norma dasar bagi individu/kolektif/institusi dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sisi ini tidak selalu tampak, tapi dapat diketahui dari pilihan tindakan yang diambil oleh pelakunya. Saya terinspirasi dari studi Lounela (2021) dalam memahami lingkungan sebagai proses yang dihasilkan dari relasi manusia dengan alam melalui tindakan kelompok sosial yang mewakili nilai tertentu. Dalam studinya tentang kehidupan orang Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, Lounela berargumen bahwa pengaturan sistem tata air oleh otoritas yang berkuasa telah menghasilkan imajinasi etis yang bersifat dinamis mengikuti perubahan sosial dan lingkungan. Imajinasi ini mencakup nilai yang mewujudkan ke dalam tindakan. Di sinilah mitos menjadi sumber informasi berharga mengenai pikiran manusia dan pengaturan kehidupan yang terintegrasi dalam sistem budaya setempat (Baal, 1987; Dove, 2021c). Praktik pengaturan pangan di sini saya baca dalam hubungan antara kuasa dan mitos yang diyakini oleh kelompok sosial. Saya mengategorikan kelompok tersebut menjadi dua: kelompok internal, yaitu masyarakat setempat, dan kelompok eksternal yang diwakili oleh agen-agen negara. Dari posisi itulah saya mengerjakan tulisan ini.

1. Mitologi Pangan di Kalimantan

Temuan arkeologis menunjukkan bahwa padi (*Oryza sativa*) sudah ada di Kalimantan sejak 4.000 tahun lalu (Sen, 1995). Sebelum mengenal jenis tanaman yang termasuk dalam jenis biji-bijian ini, penghuni Kalimantan lebih banyak menanam dan mengonsumsi umbi-umbian. Hal ini terkait dengan evolusi pertanian seperti diungkapkan oleh Dove (2021c). Dua jenis makanan ini memiliki perbedaan materi mendasar, yang satu butiran kecil dan satunya lagi butiran besar. Perbedaan ini berimplikasi pada teknologi pengolahan makanan. Metode efisien untuk memasak biji-bijian kecil (beras) ialah merebusnya dengan air di sebuah wadah, yang merupakan cara umum memasak nasi. Sedangkan umbi-umbian hanya perlu dipanggang di atas bara api. Dibandingkan umbi-umbian, biji-bijian menempatkan lebih banyak tuntutan pada tanah dengan hasil lebih rendah daripada umbi-umbian. Jenis tanaman biji-bijian membutuhkan input energi lebih besar karena lahannya perlu dibersihkan terlebih dahulu dan dikontrol terus-menerus. Di Kalimantan, peralihan pangan dari umbi-umbian ke jenis biji-bijian ini membawa implikasi pada perubahan lingkungan dan munculnya pengaturan sistem tata air dan rotasi lahan.



Secara historis, perhatian terhadap jenis tanaman biji-bijian meningkat pesat di bawah otoritas pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Namun jauh sebelumnya, bagi penghuni Kalimantan seperti orang Dayak, kesakralan yang terkandung di balik tanaman padi mencerminkan betapa pentingnya beras dalam kehidupan. Posisi padi sebagai sesuatu yang sakral ini tidak lepas dari keyakinan yang terbangun dari mitos asal-usul beras. Di Kalimantan, beras punya mitos yang sangat beragam, di antaranya kisah Pulang Gana orang Dayak Kantu di Kalimantan Barat (Dove, 2021c). Meski kisah-kisah dalam mitos pangan bervariasi, tapi intinya sama: ia menandai ciri masyarakat agraris. Di samping sebagai bahan pangan, beras juga melibatkan keyakinan bersama. Dalam kehidupan sosial, keberadaan mitos semacam ini berfungsi mengorganisasi relasi sosial melalui nilai yang tertuang di dalamnya, seperti tercermin dalam mitologi beras orang Dayak di pehuluan Kalimantan.

Dikisahkan suatu hari *Kilip Tamun Tau Uma Dayai Lekan Pandai* (dewa pencipta setan) turun ke bumi. Di sebuah kampung ia bertemu sekelompok manusia yang dipimpin Mahaji. Kilip pun bercakap-cakap dengannya. Manusia bercerita kalau mereka sedang susah karena persediaan beras hampir habis. Kilip pun menawarkan bantuan. Di danau Riong Olo ia mendengar suara kujang (makhluk halus) penunggu pohon di tepi danau. Kujang itu sedang mengingatkan anaknya agar jangan ribut karena manusia akan mati kelaparan. Mendengar hal itu, Kilip menyela, bagaimana cara menolong mereka? Kujang menyarankan Kilip menemui *Tamparo Nondo Embo Lalunganing Singkor Olo*. Kepada *Tamparo*, Kilip menceritakan kesusahan yang menimpa manusia. *Tamparo* menyuruh Kilip mendatangi *Samarikung Mulung* di *Bawo Langit*. Di sana tinggallah *Luing Ajang*, anak *Samarikung Mulung* yang menguasai segala macam padi. Kilip lalu menceritakan hal yang sama. *Samarikung* pun bersedia membagikan beras kepada manusia dengan syarat manusia mesti menukarnya dengan benda seperti guci, piring, gong, dsb. Jumlah beras yang didapat tergantung dari barang yang ditukarkan. Bila manusia memberikan gong atau guci, maka isi gong dan guci itulah beras yang akan didapat. Akhirnya untuk sementara, berkat Kilip masalah pun teratasi, dan dalam waktu singkat *Samarikung* berlimpah harta dari proses pertukaran itu. Tukar-menukar terus berjalan sampai manusia kehabisan semua barangnya. Di sini muncullah lagi masalah: Bagaimana mendapatkan beras jika barang yang dimiliki sudah habis ditukar semua? Mendengar manusia kembali mengalami kesusahan, Kilip turun lagi ke bumi. Ia mendengar lagi suara kujang yang sedang mengingatkan anaknya agar jangan gaduh, manusia terancam kelaparan karena kehabisan barang. Mendengar hal itu Kilip bertanya kepada kujang, bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kujang menyuruh Kilip menemui *Keriring Usang Tebelak Ola*. Di sana, Kilip disuruh mengajukan masalahnya ke *Tamparo*. Kata *Tamparo*, agar terbebas dari kelaparan, manusia harus menebas dan membersihkan tanah di Lingo (perbatasan Barito Utara dan Kutai). Selanjutnya Kilip diminta mengundang algojo *Soong Putes Tamun Jues Tokoh Tamun Tohong*. Setelah itu *Luing Ajang* harus diajak turun ke bumi. Saat sampai di Lingo, algojo itu harus membunuh *Luing Ajang*. Pembunuhan akan mengubah *Luing Ajang* menjadi beras yang bisa diusahakan manusia selama-lamanya. Saran tersebut dijalankan. Kilip menyuruh Mahaji dan rakyatnya menebas pohon untuk membuat ladang. Ia sendiri menuju ke *Bawo Langit* menemui *Luing Ajang* untuk membujuknya turun ke bumi. Akhirnya turunlah *Luing Ajang* ke ladang yang telah dibersihkan. Ketika sedang beristirahat, terjadilah pembunuhan yang sudah direncanakan. Si algojo tiba-tiba muncul dan menebas *Luing Ajang*. Darah muncrat berwarna-warni. Seketika langit



hujan lebat disertai guntur dan angin ribut. Alam gelap gulita. Sesaat kemudian semuanya kembali seperti semula. Kini di atas ladang yang telah dibersihkan bertebaran berbagai jenis padi: padi ketan, gandum, dsb.⁵

Mitologi ini menunjukkan bentuk relasi yang terbangun antara manusia, dewa dan setan (kujang). Mitos ini mengungkapkan usaha manusia dalam mengatasi bahaya kelaparan, yang mencerminkan moralitas kritis atas budidaya padi (Dove, 2001c), yakni dengan melangsungkan pertukaran dengan dewa. Tapi masalah kembali muncul ketika pertukaran hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu dewa. Situasi ini kemudian diatasi dengan redistribusi, yaitu pertukaran asimetris yang dilakukan dengan mengelabui dewa untuk mengambil kembali keuntungan yang telah diakumulasi ke dalam wujud padi, sehingga dapat diproduksi sendiri. Praktik pertukaran ini mengungkapkan transisi mata pencaharian ketika orang Dayak mulai menanam biji-bijian.⁶ Akan tetapi, mitos ini menyisakan pertanyaan: Seperti apa produksi beras di masa lalu?

2. Sejarah Budidaya Pertanian di Kalimantan

Sumber mata pencaharian penduduk Kalimantan sangat dinamis, berada dalam proses yang terus berubah dari waktu ke waktu. Lanskap pulau ini berbeda dari pusat pemerintahan sejak era kolonial di Jawa, wilayah dengan hamparan sawah yang dapat ditanami terus-menerus. Di masa lalu, sebagian penghuni Kalimantan di wilayah pedalaman dikenal sebagai pemburu dan pengumpul hasil hutan, seperti gaharu, rotan, kamper, getah perca, sarang burung, dan batu benzoar. Pengumpulan hasil hutan ini muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap jaringan perdagangan global (Spielmann dan Eder, 1994). Selain sebagai pemburu dan pengumpul hasil hutan, penghuni Kalimantan juga dikenal sebagai peladang. Dua corak produksi ini hadir sebagai implikasi dari spesialisasi pembagian kerja berdasarkan tuntutan kebutuhan pangan, yakni antara penghasil protein di kalangan pemburu dan penghasil karbohidrat melalui perladangan (Hoffman, 2009). Berbeda dengan sawah di Jawa, ladang berintegrasi dengan ekosistem alami yang sudah ada (Geertz, 1976). Ladang dicirikan oleh kelangkaan tenaga kerja dengan tanah yang melimpah, sedangkan sawah dicirikan oleh kelimpahan tenaga kerja dengan kelangkaan tanah. Kondisi ini membuat perladangan meminimalkan input tenaga kerja per unit hasil panen, sedangkan sawah memaksimalkan hasil panen per satuan luas (Dove, 2021b). Rendahnya populasi penduduk di Kalimantan membuat jenis perladangan lebih masuk akal bagi penghuninya daripada mengubah belantara hutan dan rawa gambut menjadi sawah seperti di Jawa, di mana hal itu hanya mungkin dikerjakan dengan sumber daya tenaga kerja yang besar.

Sifat tanah gambut sendiri memiliki daya serap air lebih kecil daripada jenis tanah mineral pada umumnya, dengan kadar keasaman yang tinggi sehingga kurang cocok sebagai

⁵ Untuk cerita selengkapnya, lihat, Sarwoto Kertodipoero. 1963. *Kaharingan: Religi dan Penghidupan di Pehuluan Kalimantan*.

⁶ Pertukaran telah lama menjadi perhatian studi antropologi untuk memahami gejala sosial. Dalam memahami pertukaran, antropologi tidak hanya melihat proses tersebut sebagai gejala ekonomi, tapi sebagai gejala yang memiliki dimensi luas meliputi keyakinan, agama, teknologi, politik, lingkungan, dan organisasi sosial. Untuk lebih jelasnya, lihat, Hidayana, 1991, "Konsep Resiprositas dalam Antropologi Ekonomi".



lahan pertanian. Furukawa (2016) menjelaskan, ada tiga gelombang pemanfaatan lahan gambut untuk kehidupan manusia. Berawal dari masuknya para petani Cina dan Siam pada pertengahan abad ke-19 di Johor dan Kedah; mereka mengeringkan genangan air dengan penggalian kanal pasang-surut. Meningkatnya permintaan pasar terhadap gambir, lada, sagu, dan tepung singkong, membuat produksi komoditas ini kian menyebar. Dalam kasus Johor, pendatang Cina membuat permukiman dan lahan pertanian di daerah hulu di sepanjang sungai dan anak sungai di zona pasang-surut air tawar. Penanam Eropa yang mengikuti teknik ini melihat pasang-surut air dapat memfasilitasi drainase, sehingga tanaman bisa diangkut dengan biaya murah lewat jaringan kanal. Cara ini dijumpai peziarah Banjar dalam perjalanannya. Hingga tahun 1910-an, orang Banjar meniru teknik ini dengan mereklamasi lahan di zona pasang-surut. Praktik inilah yang mengawali penanaman padi basah di hutan rawa gambut Kalimantan.

Selain dipraktikkan oleh orang Banjar di bagian selatan, budidaya pertanian juga dijumpai dalam kehidupan orang Dayak di pedalaman. Di masa lalu, orang Dayak menerapkan teknik perladangan berputar dengan siklus rotasi antara 5-8 tahun dan musim tanam padi satu kali setahun (Seavoy, 1973). Perladangan ini memiliki dua jenis area: di lahan basah dan di lahan kering. Lahan basah biasanya berlokasi di dataran rendah, daerah rawa, dekat dengan aliran air. Adapun lahan kering berada di dataran tinggi, seperti perbukitan. Dua tipe perladangan ini menghasilkan jumlah produksi berbeda. Di lahan kering, hasil produksi relatif seimbang dengan jumlah anggota tenaga kerja. Sementara di lahan basah, hasil produksi lebih tinggi, namun membutuhkan serapan tenaga kerja lebih banyak dengan pengaturan air dan risiko yang lebih tinggi, seperti tenggelamnya tanaman ketika curah hujan tinggi dan rentan terbakar di musim kemarau panjang, sehingga membutuhkan pengetahuan tentang pengaturan pasokan air.

Seiring waktu, pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak mungkin dihindari menuntut hasil produksi seimbang agar bisa tetap mencukupi kebutuhan pangan semua anggota komunitas. Hal ini memunculkan bentuk adaptasi pertanian intensif di Kalimantan (Seavoy, 1973). Pertumbuhan jumlah penduduk sebagai pemicu intensifikasi lahan setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yakni pertumbuhan penduduk dalam komunitas dan penambahan populasi melalui proyek transmigrasi yang dirintis oleh negara kolonial (Levang, 2003). Sebagai gambaran, pada tahun 1930 Kalimantan berpenduduk 2.169.000 jiwa, menempati wilayah seluas 539.460 km² dengan tingkat kepadatan 4 orang/km². Jumlah ini meningkat menjadi 8 jiwa/km² di tahun 1950-an, dan naik hampir dua kali lipat menjadi 14 jiwa/km² di tahun 1985 (Semedi dan Riyanto, 1996). Sebagai pembandingan, tahun 2010 penduduk Kalimantan berjumlah 13.787.831 jiwa (BPS, 2010, www.bps.go.id). Artinya, dalam kurun waktu 70 tahun penduduk Kalimantan naik 11.618.831 jiwa atau sekitar 21 jiwa/km².

Di samping pertumbuhan penduduk, penambahan populasi melalui proyek transmigrasi dapat dibaca sebagai bagian dari kontrol otoritas yang berkuasa. Berkaca dari sejarah pertanian Jawa di masa kuno, Dove (2021b) menjelaskan bahwa prasyarat pengembangan pertanian padi basah (sawah) adalah konsentrasi penduduk. Di masa lalu kerajaan sangat bergantung pada pajak hasil pertanian. Sistem pertanian yang disponsori negara dapat menjelaskan penciptaan kekuasaan politik. Gagasan ini diperkuat oleh studi O'Connor (1995), bahwa surplus beras dapat mendorong pertumbuhan penduduk dan konsentrasi sumber daya yang menopang



kekuasaan negara. Menurut Dove, dalam konsep kekuasaan Jawa, kontrol populasi adalah modal untuk mengintensifkan sektor pertanian. Kontrol atas penduduk ini dimungkinkan oleh kekuasaan yang dapat mengatur orang. Pada abad ke-19, kekuatan politik di Jawa bertumpu pada kontrol tenaga kerja pertanian, bukan lahan pertanian. Lewat sistem pajak yang meluas sejak abad ke-16, petani Jawa hanya bisa mempertahankan 40% dari hasil panennya. Warga yang tidak sreg dengan aturan ini memilih membuka ladang di hutan (Dove, 2021b), atau pindah ke pesisir menjadi nelayan di pantai utara Jawa (Yuwono, 2001).

Pertanyaannya, mengapa kekuasaan politik lebih mendukung sawah ketimbang ladang? Dibanding sawah, ladang lebih sedikit menghasilkan keuntungan bagi negara karena populasi yang rendah, hasil panen yang tidak pasti, dan tingginya mobilitas peladang yang membuat mereka sulit dikontrol. Karakteristik ini kurang menguntungkan dibandingkan pertanian menetap. Inilah mengapa negara Jawa prakolonial menggiatkan pertanian padi basah (Dove, 2021b). Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa hutan sering dianggap berbahaya dan angker. Mitos ini bisa berfungsi mengontrol warga agar tidak keluar dari pengawasan dengan buka ladang di hutan sehingga bisa mengurangi penghasilan negara. Sikap anti perladangan yang meresap hingga ke tingkat mitologi ini terus berlanjut di masa kolonial, bahkan menjalar hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Pada masa kolonial, pemerintah menyebut perladangan sebagai *roofbouw* (penjarahan). Istilah ini menggambarkan pandangan negara bahwa perladangan dapat merusak hutan dengan produktivitas rendah dan boros sumber daya (Dove, 2021b). Pandangan ini di antaranya berasal dari teknik polder ala Belanda (diulas di bagian selanjutnya) yang dari sisi produktivitas lebih tinggi daripada ladang.

Demikianlah gambaran singkat mengenai budidaya pertanian di Kalimantan yang tidak lepas dari sejarah adaptasi manusia dengan lingkungan dan kontrol kekuasaan oleh negara. Evolusi pertanian bukan hanya tentang agronomi dan ekonomi, tapi juga tentang budaya dan politik, yang tercermin dari keterlibatan otoritas politik atau tercermin dalam referensi cerita rakyat/mitos (Dove, 2001c). Peralihan mata pencaharian penduduk Kalimantan dari berburu, mengumpulkan hasil hutan, dan berladang, ke bentuk pertanian intensif tidak hanya dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan pengenalan tanaman perkebunan karet sebagai komoditas dalam jaringan perdagangan global (Dove, 1998), tetapi juga oleh zonasi hutan negara (Semedi dan Riyanto, 1996) serta pengaturan pangan. Untuk pembahasan selanjutnya, akan diulas seperti apa pengaturan pangan ini beroperasi di Kalimantan.

3. Antara Rezim Pangan dan Rezim Pengetahuan

“Polderplan membuka jalan bagi penaklukan tanah perawan yang subur di pedalaman Kalimantan, hanya bisa didekati oleh semangat petualangan dan penelitian yang berani” – H. J. Schophuys, 1953

Membincang soal sejarah rezim pangan di Kalimantan, sulit untuk tidak menyebut nama Hendrik Jurriaan Schophuys. Rekam jejaknya mencerminkan kesinambungan visi pemerintah kolonial dan pascakolonial dalam membangun lumbung pangan di Kalimantan. Tidak hanya itu, kisahnya juga mengilustrasikan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam mengotak-atik lingkungan. Schophuys adalah sarjana pertanian dari Universitas Wageningen,



Belanda, kelahiran 1904. Di usia 24 tahun, ia telah menjadi penasihat pertanian di Jawa dan Kalimantan. Tahun 1935-1936, Schophuys menyelesaikan studi doktoral dengan riset tentang pertanian di Barito (Sulistiyawan, 2019). Kompetensinya inilah yang membuat Schophuys pada tahun 1950-an dipercaya menjadi inspektur pertanian di Kalimantan untuk melayani pemerintah Indonesia.

Sebelum berkenalan lebih jauh dengan tokoh satu ini dan hubungannya dengan perubahan lingkungan di Kalimantan, ada baiknya melihat terlebih dahulu seperti apa kondisi umum Hindia Belanda, khususnya Kalimantan, seabad lalu. Pada akhir tahun 1910-an, wilayah Hindia Belanda mengalami krisis pangan. Kondisi ini disebabkan oleh sikap abai pemerintah terhadap ketersediaan beras, sehingga untuk memenuhi pasokan pangan pemerintah bergantung pada impor dari Burma. Ketergantungan ini menjadi masalah serius saat meletus Perang Dunia Pertama, yang berdampak pada terhambatnya arus transportasi perdagangan sehingga suplai beras turut terhalang. Situasi ini disusul wabah flu yang melanda Hindia Belanda tahun 1918 dan bencana kekeringan di kawasan Asia Tenggara (Sulistiyawan, 2019). Pengalaman buruk bertubi-tubi ini membuat pemerintah mulai menaruh perhatian pada pentingnya mengamankan pasokan pangan.

Pada 4 Januari 1921, surat kabar *De Locomotief* menerbitkan sebuah artikel yang menyebutkan “andaikata Borneo berada di Eropa, ia akan menjadi sumber yang tiada habis.” Pernyataan ini mewakili pandangan kolonial tentang kemungkinan yang dapat dilakukan di Kalimantan. Jurnal geografi ekonomi yang terbit pada tahun yang sama (*Tijdschrift voor Economische Geographie van Borneo's Wester-Afdeeling*, 1921) memberikan gambaran kondisi geografis Kalimantan yang potensial secara ekonomi jika dapat dikelola secara optimal. Bagi penghuninya, yakni orang Dayak, Melayu, dan Cina, pertanian adalah mata pencaharian utama, baik sebagai sumber pangan maupun untuk tujuan komersial. Keberadaan beras telah menjadi bagian dari makanan pokok, namun ketersediaannya terbilang langka. Hal ini membuat jenis makanan lain menjadi sumber pangan tambahan atau pengganti. Selain beras, sumber pangan orang Dayak zaman dulu berasal dari hewan buruan, seperti penyu, ikan, ular, monyet, biawak, tupai, juga beragam sayuran, seperti pakis, umbi-umbian (ubi kapak, ubi marau, ubi banang, ubi paung, ubi manggala), jagung, serta beragam buah-buahan yang melimpah (Mallinckrodt, 1925; Dove, 2021a). Keberagaman sumber pangan penduduk setempat ini luput dari perhatian pemerintah yang hanya berfokus pada peningkatan produksi beras sebagai tanaman komersial. Dalam rangka mengatasi kelangkaan ini, pemerintah berupaya mencari jalan keluar, di antaranya dengan memberikan kemudahan bagi swasta yang ingin menjalankan usaha pertanian di Borneo. Akan tetapi, hal ini tidak cukup menarik minat swasta, karena masalah lain yang tidak kalah penting di Borneo adalah langkanya tenaga kerja. Inilah salah satu pemicu digiatkannya kebijakan transmigrasi (*Kolonisatie*) lewat tiga proyek politik etis: irigasi, transmigrasi, dan edukasi.

Konjungtur antara ketergantungan pasokan beras, wabah, dan iklim yang kurang bersahabat saat kemarau panjang menghasilkan krisis pangan di Hindia Belanda. Hal ini menguatkan pandangan pemerintah tentang lanskap Borneo yang hampir enam kali luas Jawa sebagai wilayah yang kaya potensi sumber daya alam tetapi kurang dioptimalkan. Situasi ini mendorong pemerintah lebih giat melakukan pembangunan di Kalimantan, khususnya



budidaya pertanian, yang pada akhirnya turut menempatkan pengetahuan tentang pertanian pada posisi istimewa. Lima tahun setelah publikasi jurnal geografi di atas, perubahan lekas tampak. Pada November 1926, surat kabar *Algemeen Handelsblad* menyajikan berita betapa cepat kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan, berjudul "Van Moeras Tot Sawah." Berita serupa dimuat di surat kabar *De Locomotief* dua bulan sebelumnya.

Dalam konteks inilah Schophuys mempelajari pertanian di Borneo. Bagaimana jika lanskap berupa hutan rawa dan ladang itu diubah menjadi area pertanian intensif? Upaya ini telah dirintis pemerintah melalui Johannes Sibinga Mulder, sarjana pertanian yang juga lulusan Wageningen dan menjabat sebagai direktur Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan Hindia-Belanda. Tahun 1920-an, Mulder menggagas cetak sawah di delta Selatdjaran, Palembang, Sumatera Selatan (Sulistiyawan, 2019). Selanjutnya, dengan menggunakan teknik polder, proyek sawah diterapkan tahun 1930-an di sekitar Sungai Negara dan Martapura seluas 25.000 ha, yang airnya mengalir dari Pegunungan Meratus menuju rawa luas di Kalimantan Selatan (Schophuys, 1953). Polder adalah istilah untuk menyebut pengerjaan dataran tanah rendah yang permukaannya ditinggikan dari tanah di sekitarnya menggunakan tanggul atau genangan yang dikeringkan airnya dengan cara dipompa agar bisa dimanfaatkan sebagai budidaya pertanian. Melalui cara inilah pembuatan area pertanian skala besar di Kalimantan menjadi mungkin dilaksanakan dalam benak ahli pertanian.

Schophuys sendiri baru mendapatkan kesempatan mempraktikkan pengetahuannya di masa Indonesia merdeka. Pada awal tahun 1950-an, ia mendesain pertanian di Kalimantan Selatan, yang merupakan pengembangan dari proyek tahun 1930-an. Ide ini tidak lepas dari peran Gubernur Kalimantan Selatan (1950-1953), Murdjani. Gubernur yang berasal dari Jawa Timur dan tentunya tidak asing dengan pertanian ala Jawa ini mengusulkan "Pembukaan Kalimantan" dalam Rentjana Kesyjahteraan Istimewa (RKI) Kementerian Pertanian. Ia berusaha meyakinkan pemerintah pusat bahwa usulannya akan memberikan kemungkinan yang tidak terbatas untuk melaksanakan cita-cita kesejahteraan sosial (Sulistiyawan, 2019). Ini mengingatkan kembali pada ulasan surat kabar *De Locomotief* 1921: "Andaikata Borneo berada di Eropa, ia akan menjadi sumber yang tiada habis".

Tujuan dari rencana ini adalah menjadikan Kalimantan sebagai gudang beras nasional dengan mencetak ratusan ribu hektar sawah baru melalui pengeringan jutaan hektar lahan rawa gambut. Seperti krisis pangan yang menimpa Hindia Belanda di masa lalu, lagi-lagi ada konjungtur yang mempertemukan rencana pembukaan wilayah pertanian di Kalimantan. Usulan gubernur bertemu dengan kepentingan pemerintah pusat untuk mengamankan pasokan beras dalam negeri. Merespons usulan itu, Ir. Kaslan dari Kementerian Pertanian ditemani Schophuys meninjau lokasi di sekitar Banjarmasin, Hulu Sungai, dan Kapuas Barito (Sulistiyawan 2019). Selanjutnya, kerja mengubah hamparan rawa menjadi wilayah pertanian dipercayakan kepada Schophuys. Peristiwa ini diulas dalam surat kabar *Nieuwe courant*, 12 Februari 1951.

Simulasi matematis keuntungan yang akan dihasilkan dari rencana ini benar-benar menggiurkan. Dengan mengubah hutan rawa dan memperluas area pertanian hingga 72.000 hektar, Kalimantan akan dapat memasok 84.500 ton beras. Itu baru perkiraan awal, karena total lahan yang ditargetkan mencapai 600.000 hektar, dikerjakan bertahap selama 30 tahun. Namun

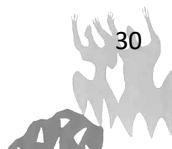


biaya polder tidak murah. Untuk setiap unit sawah polder, diperkirakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan lima kali biaya pembukaan sawah pasang-surut (*Kompas*, 3/10/1969). Meski terbilang mahal, namun daya tarik teknologi modern untuk mengubah wilayah nonproduktif menjadi pertanian yang dipresentasikan oleh Schophuys berhasil memikat pemerintah. Keinginan pemerintah untuk mengamankan pasokan beras bertemu dengan ambisi pengetahuan Schophuys untuk mempraktikkan keahliannya. Tanpa melalui kendala yang berarti, ia pun lantas dipercaya menjadi perancang sekaligus manajer proyek polder di Kalimantan.

Dalam naskah *Regional Development Corporation Polderplan Kalimantan* yang ditulis oleh Schophuys (1953) disebutkan, secara statistik ada 1,2 juta jiwa di Kalimantan Selatan yang berhasil melakukan reklamasi lahan rawa untuk ditanami padi sawah dengan luas 150.000 ha. Akan tetapi, di tahun yang sama muncul polemik yang digulirkan anggota parlemen dari Partai Komunis Indonesia (PKI), Ir. Sakirman. Polemik ini menyoal transparansi anggaran. Sakirman menuduh telah terjadi praktik korupsi yang dilakukan Schophuys. Ia juga menyindir pemerintah karena lebih memercayakan pekerjaan kepada orang Belanda yang notabene adalah penjajah daripada anak bangsa sendiri (*Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode*, 24/4/1953). Sehari berselang, berita serupa berulang di surat kabar *Het nieuwsblad voor Sumatra*. Seperti diketahui di kemudian hari, proyek ini tidak seindah yang direncanakan. Alih-alih berhasil, justru merusak ekosistem gambut. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga ahli, belum adanya pemeriksaan dari ahli hidrologi serta ketiadaan analisis dampak lingkungan dalam pengeringan rawa (Sulistiyawan, 2019). Singkat cerita, proyek Schophuys pun terbengkalai (*Tempo*, 28/4/1979). Namun, Schophuys punya alasan berbeda terkait kegagalan ini. Menurutnya, mangkraknya proyek polder disebabkan pengaruh aliran politik dan seretnya pembiayaan (Schophuys, *Kompas*, 7/11/1969). Tahun 1985, di usianya yang telah lanjut, ia mengungkapkan refleksinya:

Selama 57 tahun pengalaman semenjak 1928, penulis melihat bahwa rencana rakyat jelata sering berhasil lebih baik daripada rencana ahli-ahli pemerintah, sebab rakyat bekerja untuk kepentingan sendiri, bila perlu tanpa mengingat waktu, dan kalau gagal mereka merasakan akibatnya, yaitu kelaparan. (Schophuys, 1985: 63)

Kisah Schophuys pun berakhir di sini, tapi tidak dengan cita-cita pemerintah dalam melakukan modernisasi pertanian. Setelah proyek Schophuys gagal mencapai target, pembukaan lahan rawa berlanjut dan justru kian ambisius. Di bawah Menteri Pekerjaan Umum Ir. Pangeran Mohammad Noor (1956-1958), pemerintah menjalankan proyek *Dredge, Drain and Reclamation*. Proyek ini menghubungkan dua aliran sungai besar melalui pembuatan kanal (anjir) untuk membuka akses ke lahan rawa. Target proyek ini adalah menggali kanal Banjarmasin-Pontianak di Kalimantan sepanjang 760 km dan Palembang-Tanjung Balai di Sumatera sepanjang 850 km. Dari rencana tersebut, yang berhasil dikerjakan adalah penggalian kanal yang menghubungkan antara Sungai Barito (Kalimantan Selatan) dengan Kapuas Murung (Kalimantan Tengah), meliputi Anjir Serapat (28,5 km) yang telah digali tahun 1886 dan direhabilitasi menggunakan kapal keruk di tahun 1935, Anjir Tamban (25,3 km), Anjir Talaran (26 km); kanal antara Sungai Kahayan dengan Sungai Kapuas Murung (Kalimantan



Tengah), meliputi Anjir Basarang (24,5 km), Anjir Kelampayan (20 km); serta anjir lain di Sumatera dan Kalimantan Barat (Noor, 2012). Melalui proyek ini lintas berkembang pembukaan lahan melalui sistem handil, yaitu jaringan tata air yang digali dari tepi sungai besar masuk ke dalam sebagai jaringan irigasi.

Pengaturan ini berlanjut di bawah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Prof. Sutami (1966-1967), dengan menginisiasi Proyek Pembukaan Persawahan Pasang-Surut (P4S) 1969-1984 di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang menargetkan lahan seluas 5,25 juta hektar (Noor, 2012). Proyek ini didukung penelitian dari berbagai perguruan tinggi, antara lain UGM, IPB, ITB, UNSRI, ULM, dan Badan Penelitian Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Akademisi yang terkenal dalam proyek ini adalah Prof. Ir. Sunarjo dari UGM. Ia merancang sawah pasang-surut dengan menjadikan anjir sebagai drainase dan irigasi (*Kompas*, 3/10/1969).

Tahun 1996, proyek baru bernama Pengembangan Lahan Gambut (PLG) beroperasi. Proyek ini dilakukan di Kalimantan Tengah dengan target produksi pangan 5,1 juta ton/tahun di area gambut seluas 1.457.100 ha (*Tempo*, 5/4/1999). Selain berfokus pada pangan, PLG juga diiringi program transmigrasi. Tahun 1997, 15.100 KK petani ditempatkan di permukiman buatan. Setiap keluarga menempati rumah tipe 36 dengan lahan seluas 2 hektar untuk bercocok tanam dan 0,25 hektar untuk pekarangan, serta mendapat jaminan kebutuhan hidup selama 18 bulan berupa suplai beras, garam, dan kacang-kacangan. PLG diperkirakan membutuhkan biaya US\$ 2-3 miliar (dengan kurs tahun 1995, 1 dolar AS setara Rp 2.300), bersumber dari dana reboisasi Rp 527 miliar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (*Tempo*, 5/4/1999). Proyek ini diwarnai korupsi di setiap tahapnya, dari pembukaan lahan, pembangunan perumahan, pengadaan alat pertanian, pencetakan sawah, hingga pembangunan irigasi.

Seperti dicatat beberapa studi (lihat, McCarthy, 2013; Savitri, 2013; Goldstein, 2016; Simanjuntak dan Erwinsyah, 2020), alih-alih berhasil, PLG justru merusak lingkungan lebih fatal. Sejak tiga tahun berjalan, transmigran mulai meminta pemerintah untuk memulangkan mereka ke daerah asal karena PLG tidak seperti yang dijanjikan. Sebanyak 54.000 warga transmigran terkurung dalam kemiskinan (*Tempo*, 5/4/1999). Empat tahun berjalan, hanya 50 ribu hektar lahan yang berhasil dibuka, itu pun lebih mirip lahan terlantar. Rumah transmigran pun mulai ditinggalkan penghuninya. "Mirip kota hantu dalam cerita Western. Transmigran yang masih tersisa hanya bisa menadahi jatah hidup dari pemerintah atau terancam mati kelaparan" (*Tempo*, 5/4/1999). Mei 2002, sembilan unit permukiman transmigran (UPT) di bekas proyek PLG mengalami krisis pangan. Jebolnya tanggul yang menghubungkan UPT dengan Sungai Kahayan dan Kapuas Murung membuat sawah dan pemukiman tergenang banjir. Sekitar 4.500 keluarga tidak bisa makan nasi karena beras sudah habis. Untuk makan, warga mengandalkan ubi talas dan singkong yang bisa didapat di tempat yang tidak tergenang air. Bencana ini membuat sebagian penduduk terserang diare dan demam (*Kompas*, 14/5/2002).

Kemalangan tidak hanya menimpa transmigran, tapi juga masyarakat Dayak di wilayah PLG. Proyek ini mengacaukan pengetahuan mereka tentang regenerasi ladang di dalam kawasan hutan, karena lenyapnya hutan rawa akibat pembersihan lahan. Masyarakat Dayak juga tidak bisa bertanam mengikuti metode yang dibawa petani dari Jawa. "Kami tak bisa lagi



membaca musim saat bertanam,” kata orang Dayak dari Desa Dadahup (*Tempo*, 1/2/2004). Bagi mereka, PLG telah menghancurkan sumber ekonomi seperti rotan, *tatah* (kolam ikan dewasa), dan *beje* (kolam pembibitan) karena terpotong jaringan kanal. Potensi kayu 48.417.727 meter kubik berkurang akibat penebangan untuk saluran kanal sepanjang lebih dari 1.923 kilometer, berbagai jenis kayu khas lahan gambut seperti ramin, jelutung, kempas dan kayu yang dilindungi seperti ketiau dan nyatoh musnah, sekitar 28 jenis satwa liar yang 18 di antaranya satwa dilindungi seperti kukang, lutung, beruk, orang utan, dan beruang madu punah, suhu udara naik hingga 2-2,5° Celcius, malaria dan demam berdarah merebak, intensitas kebakaran hutan dan banjir pun meningkat (*Tempo*, 5/4/1999). Gelombang pengaturan pangan sejak permulaan abad ke-20 ini digerakkan oleh mitos yang tidak memiliki akar budaya sama sekali di Kalimantan: mitos kelimpahan beras.

Kesimpulan

Untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan pada awal tulisan ini, arsip sebagai “mata ketiga” untuk merespons dilema metode yang saya alami di tengah pandemi alhasil menjadi “mata pertama” saya dalam memahami sejarah rezim pangan di Kalimantan. Namun demikian, perannya sebagai “mata pertama” memiliki dimensi temporal. Dalam konteks riset doctoral saya sendiri, penggunaan arsip memiliki keterbatasan bagi saya sebagai peneliti untuk memahami kondisi faktual di lapangan, sehingga pembahasan tulisan ini masih menyisakan ruang kosong mengenai pengaturan pangan di Kalimantan hari ini. Sebaliknya, uraian di atas mustahil bisa saya tulis seandainya hanya bertumpu pada data terkini melalui riset lapangan. Situasi pandemi yang menghambat agenda riset lapangan mengondisikan saya untuk menyiasati keadaan dengan mengubah metode pengumpulan data dari lapangan ke data arsip dan literatur. Awalnya, ide tulisan ini bermula dari situasi kebetulan ketika saya sedang mengumpulkan data arsip dan pada saat yang sama media di Indonesia memberitakan rencana pemerintah melakukan pengaturan pangan di Kalimantan. Santernya pemberitaan tersebut membuat saya penasaran dan ingin tahu sejak kapan kebijakan pengaturan pangan di Kalimantan bermula? Kondisi seperti apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut?

Proses yang saya jalani selama mengumpulkan data arsip dan menyusun kepingan informasi membawa saya sampai pada pengetahuan bahwa pengaturan pangan di Kalimantan bukan hal yang baru. Kegagalan demi kegagalan yang dipentaskan sepanjang sejarah memperlihatkan keganjilan pemangku kuasa dalam menjalankan kebijakan pangan. Praktik pengaturan pangan dengan motif untuk memutus rantai ketergantungan pangan impor pada gilirannya menempatkan pengetahuan pertanian modern pada posisi istimewa. Di titik ini terbangun relasi intens antara pengetahuan dan kekuasaan. Usaha mengubah hutan rawa menjadi pertanian intensif skala besar menggambarkan kesinambungan bias kebijakan sejak era kolonial. Sebuah bias yang bisa dirujuk pada pertanian ala Jawa yang notabene telah dikenal dengan pertanian intensifnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dikemukakan bahwa para pemangku kebijakan dan ahli pertanian agaknya masih dibelenggu cara berpikir kolonial dalam menjalankan pengaturan pangan. Hal ini dibuktikan oleh kegagalan otoritas yang berkuasa dalam memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang meliputi pengetahuan, tradisi, teknologi, dan variasi sumber pangan lokal.



Kenyataan di atas menyisakan tanda tanya yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Bagaimana mungkin kegagalan pengaturan pangan terus berulang lintas generasi? Jika kembali pada kerangka konseptual di awal, maka jawabannya dapat terungkap melalui mitos. Sejarah panjang pengaturan pangan dengan sendirinya mencerminkan mitos turun-temurun yang diyakini pemangku kebijakan dan ahli pertanian mengenai kelimpahan beras. Ini mengingatkan pada pernyataan klasik Cassirer (1946), bahwa mitos adalah produk dari ketakutan, tetapi yang paling esensial dalam kehidupan sosial bukanlah fakta tentang ketakutan, melainkan metamorfosis dari ketakutan itu sendiri. Kekhawatiran terhadap pasokan pangan (beras) bermetamorfosis menjadi mitos kelimpahan pangan. Mitos ini secara fungsional mengorganisasi rekayasa sosial melalui pengaturan, sembari mengeliminasi mitologi dan pengaturan yang lahir dari proses panjang adaptasi manusia terhadap lingkungan, yang telah terbukti secara historis lebih adaptif serta efisien dilihat dari skala produksi, teknologi, curahan tenaga kerja, dan distribusi ekonomi. Tingginya biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat kegagalan pengaturan pangan memperlihatkan kontradiksi dari tujuan pengaturan itu sendiri. Kontradiksi paling ironis tampak manakala praktik pengaturan pangan yang dijalankan justru mengakibatkan bencana kelaparan. Hasil dari akumulasi panjang otak-atik lahan rawa menjadi area pertanian intensif skala besar bukan hanya memporandakan ruang hidup, tetapi juga meningkatkan potensi bencana lingkungan dan kerentanan sosial. Selain pembalakan hutan, tambang, dan meluasnya perkebunan, inilah yang membentuk wajah Kalimantan hari ini.

Ucapan Terima kasih

Tulisan ini adalah bagian dari penelitian doktoral saya dalam studi antropologi, yang terwujud berkat beasiswa kerja sama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Helsinki dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dalam riset “Water and Vulnerability in Fragile Societies.” Saya berterima kasih kepada Prof. Pujo Semedi, Dr. Anu Lounela, dan Dr. Pande Made Kutaneegara selaku guru, promotor dan kopromotor yang menuntun saya sedari awal proses studi, juga Amanatia Junda yang telah membaca naskah awal serta memberi masukan, Azzam Anwar, Nindyo Budi Kumoro, dan Agus Riyadi yang menjadi kawan diskusi selama proses penulisan, serta para mitra bestari dan editor jurnal yang telah memberikan saran dan masukan berharga untuk memperbaiki tulisan ini.

Pustaka**Surat Kabar dan Majalah**

Tijdschrift voor Economische Geographie; Orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie

1921 "Economische Geographie van Borneo's Wester-Afdeeling". Uitgrave: Mouton & Co., Herderstraat 5, 's-Gravenhage. Den Haag. Pp.41-58.

De Locomotief

4 Januari 1921, "Borneo en zijn hulpbronnen"

Algemeen Handelsblad

1 November 1926, "Van Moeras Tot Sawah"

Nieuwe Courant

12 Februari 1951, "Plan Schophuys door RI Aanvaard"

Java-bode

17 Maret 1952, "Polderplan voor Z.Borneo"

28 April 1953, "Dr. Schophuys over vragen van Ir. Sakirman aan regering, Onvoldoende geschoold personeel voor de administratie"

Nieuwsgier Ochtenblad voor Indonesie

31 Januari 1953, "Het water: Vriend en Vijand"

Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode

24 April 1953, "Het Polder-plan Borneo, Ir. Sakirman (PKI) Stelt vragen aan Regering"

Het nieuwsblad voor Sumatra

25 April 1953, "Corruptie en malversatie bij polderplan -Borneo"

Kompas

3 Oktober 1969, 'Tiga "Djagoan": Schophuys, Pangeran Noor, Sunarjo'

9 Desember 1995, "Esensi Pengembangan Lahan 1 Juta Ha adalah Melestarikan Swasembada Beras"

1 Maret 1997, "Amdal Regional: Hanya Sebagian lahan Gambut Bisa untuk Pertanian Pangan"

14 Mei 2002, "Korban Banjir PPLG Alami Krisis Pangan"

29 Maret 2018, "Kerentanan Akibat Larangan Bakar Hutan"

23 November 2018, "Luapan Sungai Kahayan Meluas"

9 September 2019, "Sumur Fiktif di Proyek Restorasi Gambut"

Tempo

11 November 2003, "Pencemaran Sungai Kahayan Melampaui Ambang Batas"

11 Januari 2005, "11 DAS di Kalimantan Tengah Tercemar Merkuri"



13 Februari 2008, “Tiga Sungai di Kalimantan Tengah Masih Tercemar Merkuri”

Majalah Tempo

Edisi 28 April 1979, “Sebuah Polder Telah Sia-sia”

Edisi 21 Desember 1998, “Mencabik Surga, Menuai Untung”

Edisi 5 April 1999, “Lahan Gambut Sejuta Nista”

Edisi 5 April 1999, “Gagasan Besar yang Sarat Kesalahan”

Edisi 5 April 1999, “Dampak Ekologis Pertanian Lahan Gambut”

Edisi 5 April 1999, “Hilang Rotan, Ikan pun Mati”

Edisi 3 Oktober 1998, “Tekad untuk Mengatasi Salah Kaprah”

Edisi 14 Desember 1998, “Mimpi Buruk Lahan Sejuta Hektar”

Edisi 14 Mei 2000, “Mereka dalam Bidikan DEPHUTBUN”

Edisi 14 Mei 2002, “Korban Banjir PPLG Alami Krisis Pangan”

Edisi 15 September 2002, “Kalimantan, Si Tuan Rumah Api”

Edisi 1 Februari 2004, “Petualangan dari Masa ke Masa”

Edisi 1 Februari 2004, “Pertaruhan Baru di Lahan Gambut”

Edisi 1 Februari 2004, “Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Soenarno”

Edisi 2 Oktober 2006, “Siapa Gemar Main Api”

Edisi 1 Oktober 2007, “Saya Dianggap Perampok”

Edisi 21 Juni 2010, “Padi Lahan Gambut, Mission Impossible”

Buku dan Artikel

Barthes, Roland.

2004 *Mitologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Cassirer, Ernst.

1946 *The Myth of the State*. New Haven: Yale University Press.

Dove, Michael M.

1998 “Living Rubber, Dead Land, and Persisting Systems in Borneo: Indigenous Representations of Sustainability,” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 154 (1): 20-54.

2021a “Pig-Humans and Human-Pigs: Perspectivism in Dayak Myth and Ritual,” in *Bitter Shade: The Ecological Challenge of Human Consciousness*, Pp. 32-49. New Haven: Yale University Press.

2021b “Culture, Agriculture, and Politic of Rice in Java,” in *Bitter Shade: The Ecological Challenge of Human Consciousness*, Pp.110-130. New Haven: Yale University Press.

2021c “Ritual, Myth, and the Rice of Greedy Rice,” in *Bitter Shade: The Ecological Challenge of Human Consciousness*, Pp.146-165. New Haven: Yale University Press.

Evans-Pritchard, Edward Evan.

1950 "Social Anthropology: Past and Present, the Marett Lecture," *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 50: 118-124.

1961 *Anthropology and History*. Manchester University Press.

FAO.

2020 *Addressing the Impact of Covid-19 in Food Crisis. FAO's Component of the Global Covid-19 Humanitarian Response Plan*. Roma: FAO.

Furukawa, Hisao.

2016 "History of Tropical Peatland in Southeast Asia," in *Peatlands in Harmony, 15th International Peat Congress 2016*, Kuching Malaysia 15-19 Agustus 2016. Pp. 4-8.

Goldstein, Jenny.

2016 "Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project," *Environmental & Society Portal, Arcadia* (Spring 2016), No. 6. Rachel Carson Center for Environment and Society. <http://doi.org/10.5282/rcc/7474>

Hoffman, Carl L.

2009 "Punan Foragers in the Trading Network of Southeast Asia," in Carmel Schrire (ed.), *Past and Present in Hunter Gatherer Studies*, Pp. 123-149. California: Left Coast Press.

Hudayana, Bambang.

1991 "Konsep Resiprositas dalam Antropologi Ekonomi," dalam *Jurnal Humaniora*: 20-34.

Hull, Matthew S.

2012 "Documents and Bureaucracy," in *The Annual Review of Anthropology*: 251-267.

Kertodipoero, Sarwoto.

1963 *Kaharingan: Religi dan Penghidupan di Pehuluan Kalimantan*. Penerbit Sumur Bandung.

Levang, Patrice.

2003 *Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Institut de recherché pour le developpement (IRD) Forum Jakarta Paris.

Lindblad, J. Thomas.

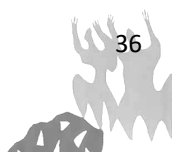
2012 *Antara Dayak dan Belanda: Sejarah Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 1880-1942*. Penerbit: KITLV Jakarta dan Lilin Persada Press.

Lounela, Anu.

2021 Shifting Valuations of Sociality and the Riverine Environment in Central Kalimantan, Indonesia, *Anthropological Forum*: 34-48.

McCarthy, J. F.

2007 "Dijual ke Hilir: Merundingkan Kembali Kekuasaan Publik atas Alam di Kalimantan Tengah," in Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Pp. 189-224. Jakarta: Yayasan Obor dan KITLV.



- 2013 'Tenure and Transformation in Central Kalimantan after the "Million Hectare" Project,' in *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*, Pp. 183-214. Ohio University Press.
- McCarthy, John F., Jacqueline A. C. Vel, & Suraya Afiff.
- 2012 "Trajectories of Land Acquisition and Enclosure: Development Schemes, Virtual Land Grabs, and Green Acquisitions in Indonesia's Outer Islands," *The Journal of Peasant Studies*, 39(2): 521-549.
- McMichael, Philip.
- 2009 "A Food Regime Genealogy," *The Journal of Peasant Studies*: 139-169.
- Mitos (Def.1) (n.d).
- 2016 *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/mitos>, 1 Oktober 2021.
- Noor, Muhammad.
- 2012 "Sejarah Pembukaan Lahan Gambut untuk Pertanian di Indonesia," dalam *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian*, Bogor 4 Mei 2012. Pp. 399-412.
- O'Connor, Richard A.
- 1995 "Agricultural Change and Ethnic Succession in Southeast Asian States: A Case for Regional Anthropology," *Journal of Asian Studies*, 54(4): 968-96.
- Savitri, Laksmi A.
- 2013 *Korporasi dan Politik Perampasan Tanah*. Yogyakarta: INSIST Press.
- 2020a "Pengantar Edisi Indonesia," in Philip McMichael, *Rezim Pangan dan Masalah Agraria*. Yogyakarta: INSIST Press.
- 2020b *Pandemi & Politik Pangan melalui Lensa Agraria Kritis*. Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences.
- Savitri, Laksmi A. & K. M. Prawirosusanto.
- 2015 "Kebun Pangan Skala Luas di Ketapang: Menggambar Angan-angan tentang Surplus Produksi," *Jurnal Analisis Sosial*, 19(1): 57-71.
- Schophuys, H. J.
- 1953 *Regional Development Corporation Polderplan Kalimantan*. Pangkalan Persatuan Serikat Polder Kalimantan.
- 1969 "Polder, Pembukaan Persawahan Pasang Surut Gaja Lama dan Gaja Baru," *Kompas* 7 November 1969.
- 1985 "Transmigrasi di Kalimantan," in Swasono & Singarimbun (ed.), *Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, Pp.43-69. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Scott, James C.
- 1998 *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.
- Seavoy, Ronald E.



- 1973 "The Transition to Continuous Rice Cultivation in Kalimantan," *Annals of the Association of American Geographers*, 63(2): 218-225.
- Semedi, Pujo & Bina Riyanto.
- 1996 *Rumah Panjang Tak Lagi Terlihat*. Jakarta: Konphalindo.
- Sen, Avirook.
- 1995 "Borneo's History in a Handful of Husks," *New Scientist*.
- Simanjuntak, Atmaezer H. & Rudy G. Erwinsyah.
- 2020 "Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan pada masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia," *Jurnal Sosio Informa, Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(02): 184-204.
- Spielmann, Katherine A. & James F. Eder.
- 1994 "Hunters and Farmers: Then and Now," *Annual Review of Anthropology*, 23: 303-323.
- Stoler, Ann Laura.
- 2010 *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. Princeton University Press.
- 2021 "Arsip Mencerminkan Sebuah Ruang Tempat Logika Kekuasaan Dipraktikkan (Wawancara)," *Jurnal Sejarah*, 4: 109-118.
- Sulistiyawan, Andrik.
- 2019 "Memperbaiki Tanah Koloni: Krisis-krisis Pangan dan Kerja-kerja Perbaikan Alumni Wageningen di Indonesia Tahun 1920-an dan 1950-an." Tesis Departemen Pascasarjana Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- van Baal, J.
- 1987 *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970)*. Jakarta: PT Gramedia.
- van der Ploeg, J. D.
- 2020 "The Political Economy of Agroecology," *The Journal of Peasant Studies* 1-24. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1725489>
- Yuwono, P. S. H.
- 2001 *Close to the Stone, Far from the Throne: The Story of a Javanese Fishing Community, 1820s-1990s*. University of Amsterdam.
- Zeitlyn, David.
- 2012 "Anthropology in and of the Archives: Possible Futures and Contingent Pasts, Archives as Anthropological Surrogates," *Annual Review of Anthropology*: 461-480.
- Dokumen Pemerintah**
- BPS.
- 2010 "Jumlah penduduk Indonesia menurut provinsi."

<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>, diakses pada 1 Juli 2019.

Film Dokumenter

Walhi Kalimantan Tengah

2021 *Fool Estate "Dilema Cita-cita Ketahanan Pangan Indonesia" (Sebuah Film Dokumenter).*